



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SERANG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. SUBADRI USULUDIN, SH
2. Jabatan : WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 401092

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 13.898.370.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 12.120.000.000
2. Tanah Seluas 803 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 264.990.000
3. Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 171.930.000
4. Tanah Seluas 2725 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 899.250.000
5. Tanah Seluas 1340 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 442.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 730.000.000

1. MOBIL, TOYOTA LIGHT TRUK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 824.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 65.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 15.517.870.000



III. HUTANG

Rp. 434.923.042

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 15.082.946.958

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.